

## **PRESS RELEASE**

### **POLRI DAN BPKP JALIN KERJASAMA UNTUK MEMPERCEPAT PENANGANAN KASUS-KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PIDANA UMUM**

**Jakarta, 29 November 2011.** Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memperkuat jalinan kerjasama dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, termasuk dalam penanganan kasus-kasus Tindak Pidana Korupsi dan Pidana Umum. Untuk mempercepat penanganan kasus-kasus tersebut, BPKP akan membantu POLRI dalam bentuk bantuan audit investigatif, audit tindak pidana perbankan, audit tindak pidana pencucian uang, perhitungan kerugian keuangan negara, pendampingan dalam penyelenggaraan Fraud Control Plan, dan bantuan tindakan lainnya sesuai kepentingan penegakan hukum. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, **Jenderal Polisi Drs. Timur Pradopo**, dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP), **Prof. Mardiasmo, Ak, MBA, PhD** bersepakat juga untuk memperkuat kualitas manajemen keuangan dan pengawasan di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia.

Penguatan jalinan kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara POLRI dengan BPKP tentang penguatan Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik di Lingkungan POLRI pada hari Selasa tanggal 29 November 2011 di Aula Gandhi, Kantor BPKP Pusat, Jalan Pramuka nomor 33 Jakarta oleh kedua Pimpinan Lembaga Negara tersebut. Selain dalam mempercepat penanganan kasus-kasus Tindak Pidana Korupsi dan Pidana Umum, kerjasama dalam memperkuat manajemen keuangan dan pengawasan dilakukan antara lain dalam bentuk pendampingan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), pendampingan dalam penyusunan dan reviu Laporan Keuangan, peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM POLRI, dan audit gabungan atas program strategis dan isu-isu terkini yang menjadi sorotan publik.

Penguatan kerjasama ini merupakan kelanjutan dari kerjasama yang telah terjalin selama ini. Sebelumnya BPKP telah membantu POLRI dalam pendampingan penyusunan Laporan Keuangan, dimana dari kerjasama tersebut, POLRI dapat menyusun Laporan Keuangan tahun 2009 dengan baik dan mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI. Selain itu BPKP sering membantu POLRI dalam perhitungan kerugian negara. Pencapaian ini mendorong kedua lembaga negara untuk memperkuat kerjasama mengingat masih banyak hal yang harus dilakukan bersama dan membutuhkan sinergitas kedua lembaga dalam meningkatkan kinerja POLRI

dalam penanganan kasus-kasus dan penegakan hukum seperti perbankan dan pencucian uang.

**Informasi lebih lanjut : Humas BPKP 021 - 8584985**

Humas BPKP